

PEMBERDAYAAN PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI NAGARI MUARO GADANG AIR HAJI - PESISIR SELATAN

EMPOWERMENT FAMILY PROGRAM PARTICIPANTS THROUGH JOINT BUSINESS GROUP DI NAGARI MUARO GADANG AIR HAJI - PESISIR SELATAN

Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: togiaratua@gmail.com

Diterima: 5 April 2016; Direvisi: 30 Mei 2016; Disetujui: 23 Juni 2016

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pemberdayaan sosial peserta PKH melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sejalan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Informan dipilih secara purposif sesuai tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan memadukan pendekatan *top down* dan *bottom up* yang secara operasional mempunyai kecenderungan sekunder. Dari 5 KUBE PKH, 4 diantaranya berkembang dengan baik, dan satu KUBE PKH gagal. Bagi KUBE PKH yang berkembang, dari 4 tahapan, proses pemberdayaan baru berjalan tiga tahapan, yaitu tahap inisiatif, pembentukan kelompok dan aksi kelompok. Sementara tahapan pengembangan belum berjalan. Namun proses pemberdayaan sudah berjalan pada arah pembangunan kelompok KUBE PKH sebagai media bantu diri (*self help group*) bagi anggotanya. Sejalan dengan hal ini dibutuhkan proses pendampingan dalam rangka pengembangan KUBE PKH. Untuk itu kepada pihak penyelenggara program, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Pesisir Selatan, dan tenaga pendamping PKH agar lebih mengarahkan pengembangan 4 KUBE PKH yang dinilai berhasil dengan cara menajagi kemungkinan koperasi simpan pinjam KUBE PKH menjadi lembaga yang berbadan hukum. Mengingat saat ini regulasi semua KUBE PKH di lokasi penelitian masih bersifat lisan perlu dituangkan secara tertulis. Pengembangan juga perlu mempertimbangkan perluasan anggota kelompok KUBE PKH, baik dengan menambah anggota dari nagari yang sama, maupun dari luar nagari dengan terlebih dahulu mengkaji kesiapan internal KUBE PKH yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat sekitar ikut serta menjalani proses pemberdayaan.

Kata Kunci: pemberdayaan, kelompok, kelompok usaha bersama.

Abstract

This study was conducted with the aim of describing social empowerment through KUBE CCT Nagari Muaro Gadang Air Haji-Linggo Sari Baganti sub district-Pesisir Selatan District. The study was conducted with a qualitative approach with case study method. In line with this, the data collection is done by observation, interviews and focus group discussion (FGD). Informants were chosen purposively to the purpose of research. The data were analyzed by descriptive qualitative research to answer the problem. The results showed empowerment through KUBE CCT Nagari Muaro Gadang Air Haji-Linggo Sari Baganti sub district-Pesisir Selatan District District run by combining a top down approach and bottom up operationally have a tendency secondary. KUBE PKH of 5, 4 of which are well developed, and 1 KUBE PKH failed. For KUBE PKH growing, from 4 stages, the empowerment process has been running for three stages, namely

stage of the initiative, the formation of groups and action groups. While the stages of development are not running. But the empowerment process is already running in the direction of development of KUBE PKH groups as auxiliary media themselves (self help group) for its members. In line with this needed assistance process in order to develop KUBE PKH. For that to the organizers program, Social Services West Sumatra Province, the Department of Social and Nakertrans Pesisir Selatan District, and assistants CCT in order to better guide the development of the 4 KUBE PKH considered successful by way of exploring the possibility of credit unions KUBE PKH into an institution with legal status. Given the current regulation of all KUBE CCT oral study site still needs to be put in writing. The development also need to consider the expansion of the group members KUBE PKH, either by adding members from the same village, and from outside the village by first reviewing internal readiness KUBE PKH concerned. Thus, local communities participate through the process of empowerment.

Keywords: *empowerment, family program participants, business group.*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan transfer dana dengan syarat rumah tangga atau keluarga yang menjadi penerima, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan tertentu.

Program ini diberikan kepada rumah tangga atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 6 tahun. Setelah itu akan dilakukan proses transformasi dengan cara meninjau perkembangan rumah tangga atau keluarga sasaran. Untuk rumah tangga atau keluarga yang tidak lagi miskin, dilakukan pemutusan program PKH (graduasi). Untuk rumah tangga atau keluarga yang masih miskin diberi tambahan waktu menerima bantuan selama 3 tahun lagi sebagai masa transisi (Kementerian Sosial, 2014). Setelah periode transisi ini berakhir, rumah tangga tersebut secara otomatis berhenti sebagai peserta PKH.

Untuk menunjang efektivitas pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) merancang program lanjutan bagi peserta PKH yang mengikuti masa

transisi. Program lanjutan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulan bagi rumah tangga atau keluarga secara berkelompok, yang dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Mengingat pesertanya berasal dari peserta PKH, maka nama program ini lebih dikenal dengan nama KUBE PKH.

KUBE merupakan program pemberdayaan khas Kementerian Sosial. KUBE memberikan bantuan bagi kelompok rumah tangga atau keluarga sangat miskin untuk memiliki usaha produktif. KUBE PKH dimaksudkan sebagai pemberdayaan sosial bagi rumah tangga atau keluarga PKH yang sedang dalam periode transisi agar memiliki kemandirian dan penghidupan yang berkesinambungan sekalipun lepas dari program PKH.

Salahsatu wilayahsasaranprogramini adalah Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan-Provinsi Sumatra Barat. Wilayah ini mengikuti PKH sejak tahun 2007 dan menjadi wilayah sasaran KUBE PKH sejak tahun 2014. Sejalan dengan hal ini, maka masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran pemberdayaan melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan?. Sejalan dengan permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan sosial

melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara singkat pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berdaya. Sedangkan dalam arti luas, Bank Dunia (dalam Usman, S. 2014, hal 35) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti upaya meningkatkan aset dan kemampuan kelompok, memperluas akses, untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sejalan dengan pengertian ini, Usman juga menjelaskan bahwa pemberdayaan mengandung makna adanya perluasan kebebasan untuk memilih dan bertindak, dan mengandung beberapa dimensi seperti dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya.

Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah individu dan atau kelompok masyarakat yang berdaya secara individu. Bagi Usman, S. (2014), berdaya secara mandiri menghendaki agar proses pemberdayaan memberi ruang bagi inisiatif lokal, termasuk sistem nilai dan organisasi keswadayaan masyarakat. Orang miskin tidak hanya dipandang sebagai pihak yang serba kekurangan dan obyek pasif penerima pelayanan. Konsep ini mengedepankan perspektif untuk melihat komunitas orang miskin sebagai pemilik beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk memperbaiki kehidupannya. Pendapat senada ditegaskan oleh Hadi (2009) yang menegaskan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Dilihat dari proses operasionalnya, pemberdayaan memiliki dua kecenderungan,

yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer adalah kecenderungan proses pemberdayaan yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan sekunder adalah kecenderungan pemberdayaan yang menekankan proses pemberian stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut seolah-olah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, G. , 2002)

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini sejalan dengan pendapat Yin (2002) yang menjelaskan bahwa penggunaan studi kasus disesuaikan dengan bentuk pertanyaan berupa “bagaimana atau “mengapa” dan diarahkan serangkaian peristiwa kontemporer. Sejalan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD). Informan dipilih secara purposif berdasarkan tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Observasi dilakukan terhadap kondisi fisik lingkungan anggota KUBE yang menjadi informan, termasuk usaha yang dijalankan. Wawancara dilakukan terhadap pengurus KUBE atau yang mewakili. Sementara focus group discussion (FGD) melibatkan tokoh masyarakat, pendamping KUBE PKH dan tokoh masyarakat seperti Wali Kampung dan Wali Nagari.

Sebagai bagian dari proses triangulasi dan pertanggungjawaban publik, hasil penelitian dibahas di tingkat kabupaten dengan melibatkan pejabat struktural dan fungsional terkait, pendamping KUBE PKH dan pendamping PKH. Proses ini sekaligus dimaksudkan sebagai upaya memperoleh masukan dan solusi dari perspektif kebijakan sosial pada tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Muaro Gadang Air Haji merupakan salah satu nama nagari (desa) di Kecamatan Linggo

Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 5 KUBE PKH di nagari ini, yang terdiri dari (1) KUBE Harapan Bersama; (2) KUBE Harapan Baru (3) KUBE Harapan PKH I; (4) KUBE Harapan Jaya; dan (5) KUBE Mauara Kandis. Kelima KUBE PKH merupakan bagian dari 130 KUBE PKH yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan (Kecamatan Lunang, Kecamatan Silaut dan Kecamatan Linggo Sari Baganti) yang meliputi 47 nagari (desa). Gambaran tentang 5 KUBE PKH ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Gambaran Tentang KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji

No.	Nama KUBE PKH	Pendidikan Pengurus			Kas Tercatat	Jenis Iuran Anggota	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Bendahara			
1.	Harapan Bersama	SMA	SMA	SD	Rp. 22.700.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Iuran bulanan ◦ Iuran sosial ◦ Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Besar iuran pada masing-masing KUBE PKH bervariasi
2.	Harapan Baru	SMA	SD	SMP	Rp. 24.680.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Iuran bulanan ◦ Iuran sosial ◦ Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Denda meliputi denda keterlambatan cicilan, dan denda ketidakhadiran rapat.
3.	Harapan PKH I	SD	SD	SMP	Rp. 27.715.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Iuran bulanan ◦ Iuran sosial ◦ Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Semua KUBE PKH memiliki aturan lisan, belum ada yg tertulis, dan belum berbadan hukum
4.	Harapan Jaya	SMP	SD	SD	Rp. 22.630.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Iuran bulanan ◦ Iuran sosial ◦ Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Setelah uang dipinjam, anggota hanya mencicil 6 kali, setelah itu macet.
5.	Muara Kandis	SD	SD	SD	Tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Iuran bulanan ◦ Iuran sosial ◦ Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Setelah uang dipinjam, anggota hanya mencicil 6 kali, setelah itu macet.

Sumber: Data Lapangan

Dilihat dari pendidikan pengurus, data pada tabel 1 di atas menunjukkan, dari 15 orang pengurus di 5 KUBE PKH, pendidikan tertinggi hanya SMA (sebanyak 3 orang) dengan jabatan ketua dan sekretaris, 3 orang SMP dengan jabatan ketua dan bendahara, dan sisanya 9 orang SD dengan jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Walau tingkat pendidikan

formal pengurus terlihat rendah, namun mereka mempunyai kemauan belajar yang tinggi. Hal itu terlihat dari sistem pembukuan keuangan KUBE PKH yang relatif sudah tertata secara administratif. Pengetahuan ini diperoleh dengan cara belajar bersama sambil bekerja menyusun pembukuan KUBE PKH.

Dilihat dari kas yang tercatat dalam pembukuan, 4 dari 5 KUBE PKH sudah berkembang. Modal awal yang dipinjam anggota sudah bertambah, sementara anggota sudah mempunyai aset sendiri berupa usaha ternak, penangkapan udang di tepi pantai, warung dan penjualan bensin. Sebagian anggota sudah 2 kali meminjam dari koperasi simpan pinjam. Ini menunjukkan perkembangan usaha anggota yang relatif maju sehingga mampu membayar cicilannya hingga mampu meminjam kembali ke koperasi simpan pinjam.

KUBE PKH Muara Kandis termasuk kategori gagal karena salah dalam menentukan jenis ternak. Mereka beternak ayam sementara lokasinya hanya lahan sempit di pinggir laut, sementara anggotanya bekerja sebagai nelayan. Sementara pengurus tidak kompak dalam bekerja. Kegagalan berawal dari kemacetan salah satu anggota, yang menjadi contoh negatif yang diikuti yang lain. Kesalahan lain, kelompok ini tidak melibatkan wali nagari sejak awal sehingga pertanggungjawaban wali nagari secara moral tidak bisa diminta.

Berdasarkan pengakuan anggota dan pendamping KUBE PKH diketahui bahwa hingga penelitian ini dilakukan tidak ada penambahan KUBE PKH di nagari ini. Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial tersendiri di kalangan masyarakat secara umum, khususnya sesama peserta PKH yang dinyatakan sebagai kelompok transisi. Apalagi dalam kenyataannya, masyarakat melihat adanya anggota KUBE PKH yang bukan berasal dari kelompok transisi. "Ini terjadi karena saat itu belum ada petunjuk yang jelas tentang persyaratan menjadi anggota KUBE PKH, siapa yang graduasi dan siapa yang transisi juga belum jelas", demikian pengakuan anggota dan pengurus KUBE PKH tersebut.

Pada saat yang sama, kecemburuan sosial ini bermakna tingginya harapan masyarakat

akan datangnya bantuan KUBE PKH ini. Melihat situasi ini berpotensi menimbulkan konflik, petugas pendamping mengambil inisiatif membangun komunikasi dengan warga, terutama dengan peserta PKH kelompok transisi. Dalam hal ini petugas pendamping memberi pengertian kepada kelompok masyarakat yang belum tertampung di dalam KUBE PKH bahwa mereka akan memperoleh manfaat KUBE PKH sekalipun tidak menjadi peserta dalam bentuk *multy effect* melalui mekanisme atau prosedur yang disepakati bersama.

2. Pembentukan KUBE PKH

Proses pembentukan KUBE ini dimulai sejak tahun 2013, dengan jumlah anggota 10 orang per kelompok. Setiap kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk mendukung kelancaran kegiatan, penyelenggara program menugaskan tenaga pendamping yang berasal dari pendamping PKH. Proses pembentukan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pra Kondisi

Sesuai dengan nama KUBE PKH, keanggotaan KUBE ini tidak terlepas dari statusnya sebagai peserta PKH. Artinya anggota KUBE PKH berasal dari peserta PKH yang sedang mengalami proses transisi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUBE PKH merupakan kelanjutan dari Program Keluarga Harapan. Jika demikian halnya, maka sudah sewajarnya antara dua program ini ada kesinkronan, baik secara substantif maupun teknis.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua peserta PKH transisi langsung masuk menjadi peserta KUBE PKH. Pihak penyelenggara beralih dengan alasan klasik terkait keterbatasan anggaran. Menanggapi hal ini, masyarakat mengaku pasrah, kecewa dan merasa dirugikan. "*kami bisa*

berbuat apa pak, mudah-mudahan aja pada kesempatan berikutnya kami masuk KUBE.”, demikian ungkapan harapan salah satu informan.

Dilihat dari kriteria penerima bantuan KUBE PKH sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial (2014) adalah: (1) penerima PKH Kohor 2007 yang masih transisi dalam usia produktif, usia 18 tahun ke atas dan sudah berkeluarga; (2) diutamakan yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki embrio usaha ekonomi produktif atau usaha kecil dan mampu bekerja kelompok; dan (3) memiliki potensi sosial ekonomi lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Ketika hal ini dikonfirmasi ke masyarakat, mereka mengaku masih banyak yang memenuhi syarat, namun belum masuk KUBE PKH. Namun mereka mengaku masih berharap akan masuk KUBE PKH pada periode berikutnya.

b. Pembentukan Kelompok

Sarwono, S. W. (2001) menjelaskan bahwa kelompok dapat dibedakan menjadi kelompok formal dan kelompok non formal. Mengacu pada pendapat ini, sesungguhnya anggota KUBE PKH sudah tergabung dalam kelompok, sejak PKH dimulai tahun 2007. Sebagai sesama peserta PKH mereka dikoordinir oleh seorang tenaga pendamping yang ditugaskan oleh penyelenggara program. Mengingat banyaknya peserta program yang harus didampingi, secara sengaja pendamping membagi-bagi warga binaannya atas sejumlah sub kelompok sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh salah satu warga binaan. Kelompok ini penulis sebut sebagai kelompok formal.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program, di luar kelompok formal tadi,

terbentuk sejumlah kelompok tanpa intervensi penyelenggara program. Kelompok ini terbentuk secara alamiah atas dorongan dan kebutuhan sesama peserta PKH. Kelompok ini penulis sebut sebagai kelompok non formal. Dengan demikian proses pembentukan kelompok ini terbagi atas 2 cara, yaitu (1) kelompok yang terbentuk secara sengaja untuk kepentingan program PKH, dan (2) kelompok yang terbentuk secara alamiah dalam perjalanan pelaksanaan program PKH.

Kategori kelompok pertama terbentuk bersamaan dengan terpilihnya sejumlah keluarga atau rumah tangga menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Secara otomatis sejumlah peserta PKH menjadi satu kelompok, yaitu kelompok peserta PKH. Bahkan kelompok ini masih dibagi dalam beberapa kelompok yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan program dengan berbagai pertimbangan. Misalnya untuk efektivitas dan efisiensi proses pendampingan.

Ini berarti bahwa inisiatif pembentukan kelompok ini ada pada penyelenggara dan atau pelaksana program. Kelompok ini dibentuk untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan sesama peserta PKH dalam rangka menyukseskan kegiatan PKH seperti verifikasi data keluarga atau rumah tangga PKH, pertemuan dengan pendamping, dan lain-lain.

Sedangkan kategori kelompok kedua tumbuh dan berkembang secara alamiah. Prosesnya terjadi berdasarkan inisiatif peserta PKH bersamaan dengan dinamika interaksi sosial dan atau dinamika psikologis diantara sesama peserta PKH sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan permasalahan masing-masing anggota pada saat tertentu.

Keanggotaan kelompok pertama bersifat formal dan terikat pada aturan program.

Sedangkan keanggotaan kelompok kedua bersifat non formal dan tidak terikat pada aturan program. Sifatnya cair sehingga seseorang dapat saja menjadi anggota dalam satu atau beberapa kelompok sekaligus pada waktu yang bersamaan, dan dapat mengakhiri keanggotaannya kapan saja dikehendaki, walaupun proses ini kadang berlangsung tanpa disadari oleh anggota kelompok yang bersangkutan.

Ini berarti bahwa di dalam kelompok peserta PKH sesungguhnya terdapat sejumlah kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam proses sosial yang dijalani bersama. Secara makro proses sosial ini berlangsung dalam kendali penyelenggara program yang setiap saat hadir di tengah kelompok dalam wujud pendamping PKH sebagai ujung tombak program.

Secara mikro proses sosial ini diwarnai oleh dinamika psikologis masing-masing individu peserta PKH dalam bingkai penyesuaian diri sesama peserta PKH yang kemudian berkembang menjadi ajang seleksi sosial diantara mereka. Mereka berteman atas dasar ketertarikan dalam penilaian masing-masing anggota, dengan kriteria masing-masing anggota, terutama berdasarkan kesamaan visi dan misi masing-masing. Bersamaan dengan berjalannya waktu, pertemanan ini senantiasa berproses dalam bentuk evolusi sosial hingga matang.

Ketika interaksi dan atau proses sosial dijalani, sebagai sesama peserta mereka saling mengenal, saling menilai, saling memahami, bahkan saling menguji konsep, visi dan misi masing-masing anggota terutama dalam forum pertemuan kelompok peserta PKH. Selanjutnya sesama anggota yang mempunyai kesesuaian atau bahkan kesamaan visi dan misi saling mendekatkan

diri hingga membentuk kelompok yang semakin kohesif. Sementara bagi mereka yang tidak satu visi akan terseleksi secara sosial hingga keluar dari keanggotaan kelompok.

Bersamaan dengan datangnya program KUBE bagi peserta PKH yang sedang transisi, kelompok-kelompok non formal ini berproses hingga bermuara pada lahirnya “benih atau cikal bakal” kelompok baru yang kemudian diformalkan dan diberi nama baru sesuai arahan penyelenggara program. Sesama anggota PKH yang sudah merasa saling cocok, langsung mengambil inisiatif bergabung dalam satu kelompok dan diberi nama baru Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH.

Proses sosial ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sebagai satu kelompok, KUBE PKH bukanlah kelompok yang terbentuk seketika atau terbentuk dalam jangka waktu pendek demi memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggara program. Sebaliknya secara personal anggota atau peserta KUBE PKH justru telah terbentuk sekaligus merespon perkembangan yang ada dalam komunitas peserta sejak PKH dimulai tahun 2007.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa kesamaan visi dan misi diantara peserta PKH menjadi kriteria sekaligus menjadi modal utama dalam penentuan anggota KUBE PKH. Situasi ini sedikit banyak memperkuat kohesivitas kelompok diantara sesama peserta PKH yang disertai dengan perasaan saling memahami, saling kontrol dan saling menolong. Bahkan diantara kelompok tersebut, solidaritas atau kesetiakawan sosial ini dilembagakan dengan membentuk koperasi simpan pinjam dengan menganggarkan modal bersama yang bersumber dari iuran sosial anggota,

hingga pada saatnya disalurkan ke anggota yang membutuhkannya ketika sakit atau mengalami musibah.

Nuansa ini mewarnai proses pembentukan KUBE PKH. Bersamaan dengan datangnya isu transformasi dan resertifikasi, peserta PKH dibagi dalam 2 kategori, yaitu kelompok graduasi dan kelompok transisi (Widianto, B. , 2012). Kelompok graduasi dinyatakan lulus dari program sehingga status kepesertaan dalam program harus diakhiri. Sementara kelompok transisi dinyatakan belum lulus sehingga kepesertaannya dalam PKH masih diperpanjang 3 tahun lagi, dan dilanjutkan dengan Program KUBE PKH.

Memasuki proses pembentukan KUBE PKH, sesama ibu-ibu peserta PKH kelompok transisi saling mengambil inisiatif membentuk kelompok setelah terlebih dahulu diarahkan oleh pendamping. Setelah mencapai 10 orang otomatis terbentuk satu kelompok KUBE PKH yang akan segera diproses untuk memperoleh bantuan. Terkait dengan hal ini, pendamping mengatakan:

“..saya tidak mau main tunjuk dalam membentuk kelompok karena takut ada yang gak pas. Takutnya mereka menerima aja karena segan menolak, pada hal hatinya tidak menerima. Yang begini cepat atau lambat pasti jadi masalah di kemudian hari.”

Penjelasan ini menginsyaratkan bahwa peserta PKH kelompok transisi yang kemudian menjadi anggota KUBE PKH sedikit banyak sudah mempunyai modal kemandirian dan kebersamaan. Modal ini sejak awal sudah terbentuk sebagai warisan atau buah dari kepesertaannya selama menjadi peserta PKH.

Chamala (1995) menjelaskan bahwa proses pembentukan kelompok dalam

konteks pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa tahapan. Sejalan dengan pendapat ini, Muktasam (2002) menyebut 4 tahapan pembentukan kelompok yang terdiri dari (1) tahapan inisiasi; (2) tahapan pembentukan; (3) tahapan aksi; dan (4) tahapan pengembangan. Sejalan dengan pendapat ini, penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa sesungguhnya inisiatif pembentukan kelompok KUBE PKH ini berasal dari masyarakat (peserta PKH yang sedang menjalani proses transisi), walaupun hal ini dimaksudkan untuk merespon program KUBE PKH dari Kementerian Sosial.

Berbeda dengan temuan Ariyanto, E dan Anas, Y (2009) di Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang menemukan bahwa pembentukan KUBE umumnya masih bersifat *top-down* dan bukan *bottom-up*, pembentukan kelompok di nagari ini sudah memadukan 2 pendekatan sekaligus (*top down* sekaligus *bottom up*). Hal ini juga sejalan dengan prinsip pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Usman, S (2014) dan Hadi (2009) di atas dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan.

Setelah tahapan inisiasi, tahapan pembentukan (tahap 2) dilakukan dengan mengundang anggota terpilih dalam rapat untuk membahas isu-isu terkait dengan kelompok KUBE PKH. Hal yang paling mendasar adalah pemilihan pengurus. Undangan dilakukan secara lisan dan atau melalui media handphone (HP). Lebih jauh informan ini menegaskan:

“Sejak awal, kami ndak bikin undangan tertulis pak. Kami ndak tahu ngetik pak. Kalau tertulis kan biaya lagi pak. Sampai kini dari mulut ke mulut aja pak, kan ndak jauh-jauh. Anak juga bisa disuruh”.

Rapat diadakan di rumah salah satu anggota sesuai kesepakatan. Forum yang dipimpin oleh salah satu anggota yang mengambil inisiatif, terlebih dahulu menyepakati struktur kelompok. Pada tahap awal disepakati bahwa pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara anggota dapat difungsikan sesuai kebutuhan dengan asas kesetiakawanan dan gotong royong.

Proses pemilihan kepengurusan KUBE PKH dilakukan secara musyawarah dan mufakat diantara anggota setelah diarahkan terlebih dahulu oleh pendamping. Proses pemilihan tidak memakan waktu yang lama karena sesungguhnya masing-masing anggota sudah lama mengamati dan sudah mempunyai pilihan orang yang dinilai layak sebagai pemimpin. Begitu kesempatan tiba untuk memilih pemimpin, anggota dengan cepat menyepakatinya secara aklamasi. Ternyata pilihan anggota ini sejalan dengan pengamatan dan harapan pendamping.

Proses pengamatan ini sudah berlangsung lama sejak mereka tergabung dalam PKH tahun 2007. Secara umum pengamatan atas kepemimpinan ini didasarkan pada integritas pribadi yang bersangkutan, yaitu konsistensi antara komitmen, pemikiran, pembicaraan, dan perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

“...nan pralu, innyo lai paduli ka sadonya anggota. Lai samo kecenyo jo kalakuannyo. Itu sajo. Awak lah lamo liek-liek urangnyo pak. Innyo lai bisa dipacayo”. (yang penting dia peduli kepada semua anggota. Omongannya sejalan dengan perbuatan. Itu saja. Kami sudah lama mengamatinya pak. Dia bisa dipercaya). Demikian pernyataan salah seorang informan.

Informan lainnya menjelaskan bahwa pilihannya atas personal kepengurusan itu

didasarkan pada kepercayaan pendamping PKH kepada yang bersangkutan selama ini.

“Salamoko urang itu nan dipacayo Pak Helmi selaku pendamping. Urang itu dipacayo pulo samo awak. Samo-samo pacayolah” (selama ini orang itu yang dipercaya Pak Helmi sebagai pendamping. Orang itu juga kita percayai. Sama-sama percayalah). Demikian pengakuan informan tersebut.

Pengakuan ini mencerminkan peran Pak Helmi selaku pendamping PKH sekaligus pendamping KUBE PKH menjalankan perannya sebagai fasilitator. Pendamping berhasil melakukan transformasi kepemimpinan sehingga terbentuk kader-kader pemimpin di lingkungan peserta PKH. Selanjutnya kader tersebutlah yang menjadi pemimpin (pengurus) dalam KUBE PKH. Menanggapi hal tersebut, lebih jauh pendamping menjelaskan:

“...kalaupun pemilihan pengurus tidak saya hadiri, saya yakin personalnya tidak akan jauh dari orang-orang yang saya perkirakan. Karena selama ini mereka juga melihat kepedulian teman-temannya. Bukan hanya sekedar bisa dipercaya, tapi mau berbuat, bahkan berkorban. Dan memang, hal yang sama juga saya lakukan. Saya ikhlas kalau harus mendampingi masyarakat tengah malam. Tapi yang namanya bensin motor tidak bisa dibayar pakai kata ikhlas kan pak. Ini sekedar contoh kecil pengorbanan pak, dan mereka mau melakukan hal yang sama...”

Penjelasan ini kembali menegaskan bahwa pemilihan pengurus KUBE PKH merupakan buah dari rangkaian proses yang dibangun sejak tahun 2007 ketika mereka mulai tergabung menjadi peserta PKH. Proses yang dimaksud adalah proses sosial dalam arti luas yang meliputi dinamika

interaksi sosial dan dinamika psikologis yang terarah pada proses pemberdayaan.

c. Pembuatan Proposal dan Nomor Rekening

Proses ini memasuki tahap aksi (tahapan ketiga) sebagaimana disebut Muktasam (2002). Aksi pertama berupa pembuatan proposal disusun oleh pendamping setelah mendengar aspirasi anggota dalam forum diskusi yang melibatkan anggota dan pengurus KUBE PKH.

“Proses ini kami tempuh atas dasar saling percaya. Mereka dengan jujur minta tolong karena mereka tidak mempunyai ketrampilan mengetik, apalagi jika dikaitkan dengan aspek teknis penyusunan proposal sebagaimana petunjuk yang ada”, demikian pengakuan pendamping.

Hal yang sama diakui oleh pengurus dan anggota KUBE PKH. “awak ko lai pacayo ka apak pendamping. Lagi pulo awak ndak lo ngarati buek proposal. Apak tu pasti buaek sarancaknyo.” (kami percaya ke bapak pendamping. Lagi pula kami tidak mengerti membuat proposal. Bapak itu pasti membuat dengan baik).

Aksi kedua adalah pembuatan nomor rekening KUBE PKH. Rekening ini dibuat oleh pendamping bersama pengurus KUBE PKH. Sejalan dengan hal ini, maka pencairan uang dari rekening juga harus dilakukan secara bersama antara pengurus dan pendamping KUBE PKH.

Selanjutnya proposal yang telah tersusun, kembali dibahas dalam rapat KUBE PKH untuk selanjutnya disahkan, dan bersama nomor rekening dan dikirimkan ke penyelenggara program di Kementerian Sosial. Pengiriman dilakukan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, yang diteruskan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Setelah proposal diverifikasi oleh pihak penyelenggara di Kementerian Sosial, akhirnya bantuan modal usaha ditransfer ke rekening KUBE PKH sebesar 20 juta rupiah. Uang ini menjadi modal bagi KUBE PKH, dengan harapan kelak anggotanya dapat mandiri dan tidak tergantung pada PKH.

3. Pemanfaatan Dana Bantuan

Setelah dana bantuan mengalir ke KUBE PKH, rangkaian aksi berikutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Model Pengelolaan Usaha

Berdasarkan pengakuan pendamping, model pengelolaan usaha KUBE PKH di Kabupaten Pesisir Selatan ada 2 kategori, yaitu (1) membentuk satu usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya sebagai satu kesatuan kepemilikan usaha bersama; dan (2) masing-masing anggota membentuk usaha sendiri dengan modal yang bersumber dari dana bantuan KUBE. Jenis usaha ditentukan dan dikelola sendiri oleh masing-masing anggota. Pendapat ini senada dengan temuan Sutaat dkk (2015) di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Setelah melalui diskusi, anggota KUBE PKH di nagari ini memilih bentuk usaha kedua. Masing-masing anggota KUBE PKH mengambil dana dari kelompok KUBE sebagai modal usaha. Selanjutnya uang tersebut dibelanjakan untuk memulai satu usaha dan atau melanjutkan usaha yang sudah ada. Dalam hal ini, jenis usaha yang akan dilakukan anggota KUBE PKH, sepenuhnya ditentukan oleh yang bersangkutan tanpa dicampuri oleh pihak penyelenggara program.

Pilihan ini dilakukan berdasarkan masukan dari pendamping setelah mendengar berita kegagalan bentuk

usaha kategori pertama di wilayah lain di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut pendamping, pilihan pertama sangat sulit pengelolaannya sehingga resiko kegagalannya sangat besar. “Warga tidak mungkin digilir untuk mengelola satu usaha, apalagi usahanya juga baru pada tahap merintis. Rumit mengatur jadwalnya pak. Akhirnya warga pun lebih memilih bentuk kedua”, demikian penjelasan pendamping.

Pertanyaan muncul terkait dengan makna KUBE. Jika usaha dilakukan masing-masing anggota, dimana relevansi makna kelompok usaha bersama?. Inilah keunikan dari KUBE PKH di wilayah ini. Mengacu pada pendapat Sutaat dkk (2015) di atas, terlihat bahwa sesungguhnya KUBE PKH di nagari ini menjalankan kedua model sekaligus. Satu sisi pilihan ini menunjukkan langkah anggota KUBE PKH mengantisipasi sekaligus mencegah konflik pengelolaan usaha sekaligus menegakkan otoritas keluarga. Sementara di sisi lain, pilihan ini menempatkan KUBE PKH sebagai kelompok kontrol untuk membantu anggotanya menjalankan dan mengatasi tugas dan permasalahan kehidupannya sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho, B (2013).

b. Pembagian Dana Bantuan Sebagai Modal Awal Usaha

Dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditampung dalam rekening KUBE PKH, disepakati menjadi milik bersama untuk dijadikan modal awal membentuk koperasi simpan pinjam bagi semua anggota KUBE PKH. Selanjutnya modal tersebut dibagi rata kepada 10 (sepuluh) anggota sehingga masing-masing anggota memperoleh modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan status pinjaman, untuk

selanjutnya dikembalikan ke usaha simpan pinjam yang dikelola pengurus KUBE PKH, dengan cara mencicil tiap bulan.

Pencairan modal awal ini dilakukan oleh masing-masing anggota dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai dengan diketahui ahli waris dan wali nagari. Isi surat menegaskan kesiapan anggota dan ahli waris untuk mengembalikan dana pinjaman ke kas koperasi simpan pinjam setiap bulan pada tanggal yang disepakati.

Proses ini menggambarkan komitmen dan keseriusan pengurus dan anggota KUBE PKH atas pertanggungjawaban uang bantuan ini. Pengurus dan anggota KUBE PKH mengambil langkah antisipatif dengan melibatkan ahli waris yang akan menanggung beban atas tanggung jawab cicilan anggota jika terjadi kegagalan dalam mencicil hutangnya ke simpan pinjam KUBE PKH.

c. Memulai dan Mengembangkan Usaha

Usaha dimulai dengan belanja peralatan yang dibutuhkan masing-masing anggota. Selanjutnya mereka menjalankan usahanya secara rutinitas dari hari ke hari sambil tetap berusaha mencari kegiatan lain yang sifatnya menghasilkan uang. Bagi mereka yang melanjutkan usaha yang sudah ada, mereka melakukan pengembangan usaha. Pengembangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dilakukan dengan memperbanyak volume usaha seperti menambah induk ayam peliharaan. Sementara secara kualitatif dilakukan dengan menambah bobot atau kualitas produksi seperti menambah variasi ayam peliharaan dengan ayam bangkok.

4. Manajemen KUBE

a. Pembukuan KUBE

Pengadministrasian dimulai dengan

menyediakan sejumlah buku yang dibutuhkan dalam proses administrasi seperti buku kas, buku anggota dan buku tamu. Proses pembuatan buku ini dikerjakan oleh pendamping, sementara pengisiannya dilakukan secara bersama oleh pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara).

Pengisian dilakukan dalam bentuk pencatatan secara manual segala kewajiban anggota ke buku anggota. Kewajiban dimaksud terdiri dari iuran atau simpanan wajib, simpanan sukarela, cicilan pinjaman, dan iuran sosial. Selanjutnya pencatatan yang sama dilakukan dalam buku kas/buku induk KUBE. Pencatatan ini dilakukan sekaligus untuk mencocokkan catatan yang ada dalam buku anggota dengan buku kas.

Waktu pencatatan dilakukan pada saat berlangsungnya forum pertemuan bulanan yang dihadiri semua anggota. Masing-masing anggota hadir pada waktu yang disepakati dengan membawa buku anggota dengan menyelipkan uang yang menjadi kewajibannya di dalamnya. Buku anggota yang berisi uang tersebut ditumpuk di atas satu meja yang disediakan oleh pengurus. Selanjutnya buku berisi uang tersebut dihitung satu persatu sekaligus dicatat hingga selesai. Terakhir hasil pencatatan dibacakan oleh pengurus untuk menjadi perhatian seluruh anggota. Jika terjadi kesalahan, pada kesempatan tersebut langsung dikoreksi. Hasil koreksi kembali diumumkan hingga diperoleh kesepakatan.

Untuk memastikan kebenaran pencatatan, sesama pengurus KUBE PKH di nagari ini menjadwalkan pertemuan dalam periode tertentu dengan lokasi yang berpindah-pindah di antara rumah pengurus KUBE PKH. Dalam forum ini mereka diskusi saling membandingkan buku kas masing-masing sambil mengevaluasi. Jika terjadi kesalahan, langsung dikoreksi saat itu juga dan hasil perbaikan dikomunikasikan

kembali ke anggotanya pada bulan berikutnya dalam forum pertemuan bulanan.

b. Keberfungsian Pengurus

Secara umum kepengurusan KUBE terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tidak ditemukan unsur lain dalam kepengurusan seperti wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan seksi-seksi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan KUBE PKH, pengurus berusaha membagi habis tugas secara fungsional hingga melibatkan semua anggota sesuai kemampuan masing-masing.

Sesama pengurus terlihat kompak bekerjasama dalam berbagai kegiatan KUBE, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal. Secara internal, pengurus aktif berkomunikasi dengan anggota menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan KUBE PKH, sementara secara eksternal pengurus membina relasi dengan berbagai pihak terkait mencari peluang pengembangan usaha, walau hal ini baru sebatas tingkat desa/nagari.

c. Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota dalam manajemen KUBE PKH dapat dikategorikan atas 2, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah partisipasi yang dilakukan anggota dengan mengambil inisiatif untuk memulai terlibat dalam kegiatan KUBE tanpa menunggu instruksi atau perintah dari pengurus. Sementara partisipasi pasif adalah partisipasi yang dilakukan anggota dengan menunggu perintah pengurus KUBE terlebih dahulu. Dalam hal ini partisipasi aktif terlihat lebih banyak dibandingkan dengan partisipasi pasif.

Beberapa bentuk partisipasi aktif anggota terlihat dari sikap mengambil inisiatif dalam

berbagai hal. Misalnya saling mengingatkan atau saling mengajak menghadiri pertemuan bulanan, memberikan usulan, gagasan, pendapat atau tanggapan dalam forum rapat, melaporkan kejadian tertentu yang terkait dengan KUBE PKH, melaporkan dinamika yang terjadi di masyarakat, kepada pengurus dan lain-lain. Sementara partisipasi pasif ditunjukkan dengan cara melakukan sesuatu kalau yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Kelompok ini terkesan masih takut memulai sesuatu karena takut disalahkan oleh anggota yang lain dan atau kelompok masyarakat lainnya di nagari ini.

5. Peran Kepala Desa (Wali Nagari)

Sebagai salah satu pilar tertinggi dalam struktur kepemimpinan desa/nagari, wali nagari mengetahui dinamika sosial yang terjadi dalam wilayahnya, termasuk proses pembentukan dan perkembangan KUBE PKH. Dalam hal ini, wali nagari dan atau melalui stafnya menerima laporan secara koordinatif dari pendamping dan atau pengurus KUBE PKH, baik secara lisan maupun tertulis.

Sebaliknya dalam kesempatan tertentu, wali nagari dan atau stafnya juga berkunjung ke KUBE PKH dan mengadakan dialog secara terbatas membahas perkembangan KUBE PKH. Hal ini dibuktikan dengan catatan kunjungan yang tertera dalam buku tamu KUBE PKH. Wali Nagari tercatat sebagai tamu dan menuliskan pesan dan kesan berupa saran dan motivasi bagi perkembangan KUBE PKH.

Walau secara teknis Wali Nagari tidak terlibat dalam proses administrasi pembukuan KUBE PKH, kunjungan ini menunjukkan bahwa Wali Nagari mempunyai komitmen untuk terlibat dalam pembinaan KUBE PKH. Terkait dengan hal ini, Wali Nagari secara eksplisit menegaskan bahwa beliau mempunyai

cara tertentu untuk mengontrol KUBE PKH. Lebih jauh dijelaskan:

“kalau sedikit aja ada berita yang agak miring tentang KUBE PKH ini, kita akan cek dengan cara mengunjungi pengurus atau ke salah satu anggota. Sedikit aja ada berita nggak enak, kita akan tindak lanjuti. Tentu saja kita tidak mencampuri urusan dapur kelompoknya. Kalau ndak bisa mengunjungi, kita punya cara lainlah.”

6. Peran Kecamatan dan Dinas Sosial Nakertrans

Berdasarkan keterangan anggota dan pengurus, KUBE PKH jarang mendapat perhatian dari pihak kecamatan, khususnya pihak Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan. “Kami hanya dikunjungi orang pusat, kecamatan dan kantor bupati ndak pernah pak”, demikian pengakuan anggota dan pengurus KUBE PKH yang menjadi informan pada 5 KUBE PKH di nagari ini.

Hal yang sama terjadi di Dinas Sosial dan Nakertrans. Perbedaannya adalah, kunjungan Dinas Sosial dan Nakertrans jarang karena Dinas kekurangan pegawai. Walaupun kunjungan lapangan tidak ada, namun pihak Dinas Sosial dan Nakertrans senantiasa memantau perkembangan KUBE PKH dengan memanfaatkan media komunikasi yang tersedia melalui petugas pendamping dan laporan bulanan pendampingan.

Permasalahan lain yang dialami oleh Dinas Sosial dan Nakertrans setempat adalah keterbatasan anggaran APBD. Namun demikian melihat perkembangan KUBE PKH saat penelitian ini dilakukan, pihak pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

7. Pendampingan

Pendamping KUBE PKH berasal dari

pendamping PKH yang sudah bertugas sejak program bantuan tersebut dimulai pada tahun 2007. Pertimbangan ini dilakukan demi efektivitas proses pendampingan. Antara petugas pendamping dan warga yang didampingi sudah saling mengenal sehingga persoalan komunikasi tidak lagi menjadi hambatan. Asumsi ini ternyata benar. Mereka sudah saling memahami sehingga pelaksanaan pendampingan tidak mengalami hambatan psikologis.

Konsep menejemen hati yang diaplikasikan dengan kesetaraan antara pendamping dengan warga yang didampingi menjadi kunci sukses pendampingan. Dalam hal ini pendamping memosisikan diri sebagai mitra yang sejajar bagi warga yang ia dampingi. Sebaliknya warga menerima pendamping sebagai sahabat bukan sebagai atasan atau pengawas. Dengan konsep ini pendamping mengintegrasikan diri sebagai bagian integral dari warga, sehingga warga tidak segan mengajak pendamping berdiskusi tentang berbagai hal.

Situasi kondusif inilah yang membuka moment bagi pendamping memotivasi warga yang didampingi untuk memanfaatkan bantuan KUBE PKH dengan sebaik-baiknya demi masa depan yang lebih baik. Keterbatasan ruang dan waktu dalam pendampingan mampu diatasi dengan memanfaatkan media komunikasi. “Kami ndak sagan-sagan telpon pendamping. In nyo lai tabuka ka awak” (kami nggak segan-segan menelepon pendamping. Dia terbuka ke kami), demikian pengakuan salah satu warga.

Pengakuan akan kedekatan warga dengan pendamping ini semakin nyata ketika salah satu pendamping harus mengakhiri masa tugasnya. Warga merasa sangat kehilangan atas berakhirnya masa tugas pendamping yang sangat diidolakan oleh warga ini. “Manangih hati awak pak jo perpisahan ikko. Awak ndak

tau entah yo entah ndak, panggantinya lai sa elok apak ko?” (menangis hati kami pak dengan perpisahan ini. Kami nggak tahu apa ya atau tidak, apakah penggantinya sebaik bapak ini?), demikian tanggapan umum warga dampingan yang disampaikan salah seorang warga dalam acara perpisahan. Tanggapan ini kembali dipertegas oleh salah seorang pengurus KUBE PKH dengan menyatakan bahwa warga tetap berharap agar pendamping tersebut tetap membuka hati dan pikirannya kepada warga, terutama terkait dengan urusan KUBE PKH.

8. Kinerja Pemberdayaan Melalui KUBE PKH

Sebagaimana dijelaskan di atas, pemberdayaan mempunyai empat dimensi. Sejalan dengan hal ini, kinerja pemberdayaan dapat dilihat dalam dimensi dimaksud, yaitu dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya. Sedangkan indikator pemberdayaan dapat dilihat dalam 8 aspek sebagaimana dikemukakan oleh Girvan (dalam Hadi, tt hal 4-5). Kedelapan aspek dimaksud adalah (a) kebebasan mobilitas; (b) kemampuan membeli komoditas kecil; (c) kemampuan membeli komoditas besar; (d) terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga; (e) kebebasan relatif dari dominasi keluarga; (f) kesadaran hukum dan politik; (g) keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; dan (h) jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Selanjutnya kinerja pemberdayaan melalui KUBE PKH ini terlihat dari manfaat yang dirasakan oleh anggota KUBE PKH dan warga sekitar, khususnya dalam 4 dimensi dikaitkan dengan indikator pemberdayaan sebagaimana dijelaskan di atas. Manfaat tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

a. Manfaat Sosial

KUBE PKH dengan segala mekanisme organisasi atau kegiatannya membawa

manfaat tersendiri bagi warga sekitar, baik secara sosial maupun psikologis. Bersamaan dengan meningkatnya pertemuan sesama anggota dan atau inter dan antar pengurus KUBE PKH dengan pendamping KUBE PKH, langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya peningkatan pertemuan warga, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meningkatnya interaksi sosial warga sekitar yang dimotori oleh KUBE PKH ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi yang membahas permasalahan anggota dan warga sekitar. Terkait dengan hal ini salah satu informan menjelaskan:

“Selain membahas masalah KUBE, kalau kumpul kami juga sering membahas masalah lain. Mulanya hanya ngobrol, lama-lama serius pak. Kadang masalah pendidikan anak, masalah keluarga antar suami-istri, anak tetangga yang mau nikah, dan lain-lain.”

Informan lain mengakui manfaat KUBE PKH dengan memberikan contoh manfaat yang diperoleh secara sosial dengan menegaskan:

“Rasanya kami jadi banyak teman untuk curhat pak. Kalau ada masalah kami pasti diskusikan dengan sesama anggota KUBE ini pak. Kami sudah saling percaya pak. Paling tidak, teman ini akan memberi bantuan sementara. Nanti kalau tiba saatnya ngumpul, kami bahas lagi. Orang kampung yang nggak masuk KUBE PKH juga sering datang diskusi dengan kami pak. Mereka datang karena kami dianggap bisa membantu. Kalau datang ke rumah, mereka sering menyatakan ‘kalian kan ada usaha bersama, saling tolonglah kita’. Itu terjadi ketika mereka mau barallek (pesta). Jadi kami lebih sering dilibatkan dalam acara-acara di kampung ini pak. Kalau

dulu hanya sebagai undangan, sekarang kami dilibatkan sebagai panitia”

Penjelasan ini mencerminkan bahwa KUBE PKH juga berkembang menjadi media sosialisasi dan edukasi bagi sesama anggota dan warga sekitar. Dalam konteks inilah anggota KUBE PKH mengembangkan kebebasan mobilitasnya dalam kegiatan kemasyarakatan, baik yang terkait dengan urusan KUBE PKH, maupun yang lainnya.

Untuk kehidupan keluarga, anggota KUBE PKH yang terdiri dari kaum ibu ini mengaku mengalami peningkatan posisi tawar. Bersamaan dengan meningkatnya posisi ekonomi kaum ibu, mereka lebih sering diajak diskusi oleh suami dalam pengambilan keputusan kehidupan keluarga. Menceritakan hal ini, seorang ibu yang juga pengurus KUBE PKH menegaskan:

“awak sibuk di luar rumah kan urusan keluarga juga. Bila perlu suami saya ikut membantu kegiatan saya. Bapak kan lihat sendiri. Karena saya sibuk urusan KUBE PKH, suami saya tanya saya dulu kalau mau pergi, karena anak kami yang kecil belum boleh ditinggal. Jadi dia nanti malam aja pergi pak.”

Kejadian ini juga dilihat langsung oleh pendamping PKH, sekaligus mengomentarnya dengan mengatakan *“ya beginilah pak. sedikit banyak ada perbaikan. Sedikit banyak bahwa suami tidak mendominasi keluarga”*. Dalam hal ini penulis melihat adanya perbaikan relasi gender yang mengarah pada kesetaraan.

Khusus untuk kalangan pengurus dan sebagian anggota KUBE PKH, muncul ketrampilan sosial yang didukung oleh rasa percaya diri yang tinggi. Hal ini terlihat dari acara perpisahan dengan pendamping yang harus mengakhiri tugasnya, yang

juga dihadiri penulis. Pengurus dan sebagian anggota dengan inisiatif sendiri merencanakan dan menyusun acara perpisahan tanpa melibatkan pendamping atau pihak luar. Mereka tampil sebagai protokol/pembawa acara, memberikan kata sambutan, dan seterusnya.

b. Manfaat Ekonomi

Penelitian ini tidak dapat mengukur dengan pasti secara kuantitatif tingkat perkembangan ekonomi peserta KUBE PKH. Namun secara kualitatif anggota dan pengurus KUBE PKH menjelaskan trend positif yang dialami. Salah satu informan mengakui adanya perbaikan ekonomi dalam keluarganya dengan mengatakan:

“lumayan pak kiniko ekonomi rumah tangga tambah baik. Kalau ndak baik mana mungkin anak awak kuliah. Uang masuknyo awak pinjam dari simpan pinjam dari KUBE PKH. Cicilannyo dari hasil tangkap udang. Usaha tangkap udang dulu dimodali KUBE PKH. Jadi awak udah duo kali pinjam pak. Partamo modal usaha tangkap udang. Kaduo uang kulian anakku pak.”

Perkembangan lainnya, seorang anggota KUBE PKH memanfaatkan uang KUBE PKH dengan beternak ayam kampung dengan modal awal 2 juta rupiah. Uang tersebut dimanfaatkan untuk membuat kandang ayam dan membeli bibit ayam kampung dalam ukuran yang yang bervariasi. Sekarang selain modal awal sudah selesai dicicil, ibu tersebut juga melakukan pengembangan usaha dengan memelihara ayam bangkok. Dengan penuh semangat ibu tersebut menjelaskan:

“lumayan sekali pak. ayam ini kuanggap aja sebagai tabungan. Kalau sudah besar, harganya bisa mencapai jutaan untuk satu ekor, apalagi kalau terawat dengan baik. Ada aja yang datang yang mencari pak.

Mungkin saling memberitahu kalau kami pelihara ayam bangkok. Pas butuh untuk uang masuk sekolah kami jual aja pak”

Pengakuan yang senada dikemukakan oleh anggota KUBE PKH lainnya. Puncak dari pengakuan ini terlihat ketika seorang pendamping PKH yang juga menjadi pendamping KUBE PKH berhenti menjadi pendamping karena yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tanpa dikomando, sesama pengurus dan anggota KUBE PKH yang didampingi mengambil inisiatif merencanakan pertemuan perpisahan.

Pada kesempatan perpisahan ini, diadakan makan bersama, kata-kata sambutan hingga pemberian kenang-kenangan dari setiap kelompok KUBE PKH yang didampingi. Di luar dugaan peneliti, salah satu KUBE PKH memberikan kenang-kenangan berupa cincin emas. Walau peneliti tidak tahu persis nilai nominal cincin dimaksud, namun kejadian ini sangat menakjubkan dan mengharukan situasi perpisahan ini.

Gambaran ini menunjukkan betapa KUBE PKH membawa manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat. Manfaat ini tidak saja dinikmati oleh sesama anggota KUBE PKH, tetapi juga oleh masyarakat lain yang bukan anggota KUBE PKH. Mereka dimungkinkan meminjam uang simpan pinjam KUBE PKH dengan syarat dijamin oleh salah satu anggota terdaftar, dan hal ini sudah terjadi di salah satu KUBE PKH. *“Saya yang pinjam dari simpan pinjam KUBE PKH, tetapi yang memakai uangnya berdua dengan tetangga, ya kami cicil bersama”*, demikian pengakuan salah satu informan.

Secara umum, anggota KUBE PKH mengatakan dengan tegas, bahwa simpan

pinjam KUBE PKH menjadi semacam unit gawat darurat bagi keuangan keluarga. *“Pokoknya kalau suami ndak dapat uang, kami bisa pake dulu uang KUBE PKH pak”*.

Secara psikologis, anggota mengaku bahwa saat ini keluarganya lebih nyaman terkait dengan ekonomi rumah tangga karena ada dana cadangan bagi anggota KUBE PKH ketika anggaran rumah tangga membutuhkannya. Walau uang ini sifatnya pinjaman, namun hal itu sangat menolong bagi anggota. Sejalan dengan hal ini, sesama anggota senantiasa waspada agar uang KUBE PKH tetap utuh sebagai uang bersama. Keterlambatan dalam membayar iuran, termasuk cicilan pinjaman akan dikenakan denda. *”Ini sudah menjadi kesepakatan bersama pak, dan selama ini tetap berlaku”*, demikian pengakuan salah satu pengurus yang menjadi informan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa anggota KUBE PKH belum berhasil menambah komoditi (besar atau kecil) sebagai hasil dari pemberdayaan ini, namun mereka sangat senang karena keluarga mempunyai sandaran ketika kebutuhan mendesak. *“kalau beli-beli barang, nanti ajalah pak. nan pralu kini ko, makan lancar, sekolah anak lancar, dan keluarga lai sehat”*.

c. Manfaat Politik

Meningkatnya frekwensi pertemuan inter dan antar kelompok KUBE PKH, secara otomatis meningkatkan interaksi sosial diantara sesama anggota. Sadar atau tidak, forum ini dimanfaatkan menjadi ajang diskusi untuk merespon berbagai hal, seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (seperti gubernur, bupati, hingga wali nagari atau kepala desa), kondisi fisik wilayah masing-masing, pendidikan anak, sikap aparatur pemerintah, dan lain-lain.

Walaupun diskusi cenderung berkembang tanpa diarahkan, namun forum ini cukup efektif menjadi media diskursus bagi anggota KUBE PKH, bahkan masyarakat sekitar di luar anggota KUBE PKH. Sesama anggota KUBE PKH bertemu sekaligus berani untuk berdebat, saling mendukung, bahkan saling berselisih untuk beberapa saat dalam pemikiran dan sikap dalam merespon sesuatu. Dinamika ini berkembang terus hingga pada saatnya diperoleh kesamaan sikap dan pendapat yang lebih progresif.

Hal ini terlihat ketika musim pemilihan umum tiba. Para anggota KUBE PKH saling memberi dan menerima informasi tentang sejumlah figur calon yang akan dipilih dengan harapan bahwa pilihan anggota akan dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang, walaupun pada akhirnya independensi anggota tetap dihormati, sehingga keputusan akhir tetap ditentukan oleh individu anggota.

Sambil menunggu dimulai acara rapat, sesama anggota KUBE PKH terlibat diskusi tentang pilihan politik partai dalam pemilu, pilihan calon legislatif, pilihan dalam pilkada seperti wali nagari, bupati dan gubernur. Melihat suasana diskusi ini, salah satu informan menjelaskan *” kiniko urang-urang ko tambah berani pak. Kalau ndak suko, langsung dikecean”* (sekarang orang-orang ini tahbah berani pak. kalau nggak suka langsung dikatakan), demikian penjelasan seorang pengurus KUBE PKH dalam bahasa lokal. Ini berarti bahwa anggota terlihat lebih asertif dalam menyampaikan pendapatnya di dalam forum rapat.

Ini berarti bahwa anggota KUBE PKH mempunyai kesadaran hukum dan politik. Mereka berani memprotes sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sebaliknya mereka

juga mendukung sesuatu yang bersifat membangun dengan cara menunjukkan partisipasinya. Hal ini diakui oleh wali nagari setempat yang mengatakan “*mereka sering kami memanfaatkan untuk membantu urusan nagari pak, terutama yang terkait dengan urusan kemasyarakatan dan adat istiadat*”.

d. Manfaat Budaya

Budaya yang dimaksud dalam tulisan ini tidak hanya terbatas pada tradisi adat istiadat yang berlaku pada wilayah/nagari ini. Namun dalam arti luas, mencakup budaya globalisasi yang menuntut perhatian dan peran modal manusia semakin signifikan, tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Widjajanti, Kesi (2011). Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam budaya globalisasi ukuran modal manusia (human capital) adalah intelektualitas berupa kondisi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal yang didukung oleh kesehatan jasmani dan rohani yang prima dan kemampuan melakukan hubungan/interaksi antarsesama secara baik, menguntungkan, dan berkelanjutan.

Syabra, R (2003) menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, serta menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu dengan yang lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan. Modal ekonomi dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Namun dalam kondisi tertentu, modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, berupa kualifikasi pendidikan, terutama di era globalisasi saat ini.

Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana anggota KUBE PKH menyadari akan pentingnya budaya pendidikan sebagai kebutuhan prioritas?. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan kunci kemajuan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Huseini, M (1999) yang menjelaskan bahwa “modal manusia merupakan refleksi dari pendidikan, pengalaman, intuisi dan keahlian”.

Terkait dengan hal ini, anggota KUBE PKH secara terbuka menuntut akselerasi demi kemajuan dalam berbagai hal. Secara psikologis terlihat motivasi seluruh anggota KUBE PKH untuk menambah berbagai ketrampilan. Bahkan ketika penelitian berlangsung, salah satu anggota KUBE PKH memohon kepada penyelenggara program agar mereka dibekali dengan ketrampilan memelihara udang di kolam sehingga tidak melulu tergantung pada hasil tangkapan di tepi pantai/laut.

Kelompok lainnya yang memelihara ayam menuntut diadakan penyuluhan ternak ayam bangkok. Lebih jauh informan ini menjelaskan dengan bahasa lokal bahwa mereka mau ayam peliharaannya bervariasi. Ada ayam kampung, ada ayam bangkok. Jadi bisa jual telur ayam kampung, ayam kampung dan ayam bangkok. Telor bisa dijual harian atau mingguan, ayam kampung buat bulanan, dan ayam kampung bangkok untuk tahunan.

Penjelasan ini menggambarkan bahwa secara kognitif, anggota KUBE PKH berkembang secara positif. Belajar dari pengalamannya, mereka bisa menemukan *strategy coping* tersendiri dalam menyiasati persoalan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Hanya saja mereka masih terbentur oleh persoalan penyakit ayam yang tiba-tiba sakit dan mati mendadak.

Kepada peneliti mereka memohon dicarikan solusinya.

Ini berarti bahwa di kalangan anggota KUBE PKH ini sudah tumbuh benih jiwa wira usaha. Bahkan untuk sebagian kecil sudah memulai usaha baru dengan modal awal yang dipinjam lagi dari simpan pinjam KUBE PKH setelah pinjaman pertama lunas. Usaha tersebut berupa warung kecil dan Pertamina (usaha penjualan bensin) dengan lokasi di pinggir jalan. Kepada peneliti, si ibu yang mengelola warung dan Pertamina ini mengaku menghabiskan modal awal Rp 5 juta rupiah untuk memulai usaha ini.

Hal yang sama terjadi dalam pendidikan anak. Budaya menyekolahkan anak dan budaya sehat sebagai warisan dari Program keluarga Harapan masih terpelihara. Seorang anak anggota Kube PKH yang juga pengurus berjabaku kuliah di swasta sambil kerja mengajar di Taman Kanak-Kanak. Keberhasilan ini menjadi inspirasi di sekitar nagari, terutama karena sering dijadikan contoh oleh pendamping KUBE PKH. Secara terbuka sang ibu anggota KUBE PKH ini menyebut:

“Awak ndak mau anak awak susah bantuak awak kiniko gara-gara ndak sakolah, cukuik awak sajo. Anak awak jangan. Kini ko kan allah ado KUBE PKH nan ka manolong awak?”. (kami nggak mau anak kami susah seperti kami, cukup kami saja. Anak kami jangan. Sekarang kan sudah ada KUBE PKH yang akan meolong kami?).

KESIMPULAN

Pemberdayaan peserta PKH melalui KUBE di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Lingo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan memadukan pendekatan top down dan bottom up yang secara operasional

mempunyai kecenderungan sekunder. Dari lima KUBE PKH, empat diantaranya berkembang dengan baik, dan satu KUBE PKH gagal. Bagi KUBE PKH yang berkembang, dari empat tahapan proses pemberdayaan baru berjalan tiga tahapan, yaitu tahap inisiatif, pembentukan kelompok dan aksi kelompok. Sementara tahapan pengembangan belum berjalan. Namun proses pemberdayaan ini sudah berjalan pada arah pembangunan kelompok KUBE PKH sebagai media bantu diri (*self help*) bagi anggotanya. Sejalan dengan hal ini dibutuhkan proses pendampingan dalam rangka pengembangan KUBE PKH.

SARAN

Kepada pihak penyelenggara program, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Pesisir Selatan, dan tenaga pendamping PKH agar lebih mengarahkan pengembangan 4 KUBE PKH yang dinilai berhasil dengan cara menjajagi kemungkinan koperasi simpan pinjam KUBE PKH menjadi lembaga yang berbadan hukum. Sejalan dengan hal ini, mengingat saat ini regulasi semua KUBE PKH di lokasi penelitian masih bersifat lisan perlu dituangkan secara tertulis.

Bersamaan dengan rekomendasi di atas, pengembangan juga perlu mempertimbangkan perluasan anggota kelompok KUBE PKH, baik dengan menambah anggota dari nagari yang sama, maupun dari luar nagari dengan terlebih dahulu mengkaji kesiapan internal KUBE PKH yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat sekitar ikut serta menjalani proses pemberdayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui forum ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hemat Sitepu sebagai mitra dalam proses penelitian dan semua informan yang memberikan data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, E. dan Anas, Y. (2009). *Rekonstruksi Pemodelan Kelompok Usaha Bersama Dalam Program Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Chamala, R.S.(1995). *Overview of Participative Action Approaches in Australian Land and Water Management*. Brisbane: Australian Academic Press.
- Hadi, A. P. (2009) *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan Oleh Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* <http://lombokcommunity.blogspot.co.id/2009/06/konsep-pemberdayaan-partisipasi-dan.html>. Diakses 4 April 2016.
- Huseini, M. (1999). *Mencermati Misteri Globalisasi: Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia Melalui Pendekatan Resource-Based*. Depok: Fisip Universitas Indonesia
- Kementerian Sosial. (2014). *Kebijakan Transformasi PKH: disampaikan pada Seminar Bantuan Sosial dan Penghidupan Berkelanjutan di Jakarta*, 19 Agustus 2014. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial. (2014). *Petunjuk Teknis Usaha Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Melalui KUBE PKH Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Muktasam, A. (2002). *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes*. The University of Queensland (Ph. D Thesis).
- Nugroho, Bambang. (2013). *Rekonstruksi Kelompok Usaha Bersama*. *Majalah Informasi* Volume 18 Nomor 01. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Sarwono, S. W. (2001). *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharto, Edi. (2004). *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi*. Malang: Disampaikan pada pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Miskin bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Malang 12 April 2004. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm. Diakses tanggal 4 April 2016.
- Sumodiningrat, G. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Sutaat dkk. (2015). *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial Bagi Peserta Program Keluarga Harapan Melalui Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Puslitbangkesos-Kementerian Sosial RI.
- Syabra, R. (2003). *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 01. No. 1-5. <http://www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbdfpustaka.pdf>. diakses 4 April 2016
- Usman, S. (2014). *Pemberdayaan Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat*

Lahan Suboptimal: disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian yang Inklusif untuk Memajukan Petani Lahan Suboptimal di Palembang, 26-27 September 2014. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

Widianto, B. (2012). *Kebijakan TNP2K Dalam Pengelolaan Data Terpadu Mendukung Strategi Transformasi PKH*. <http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/10.%2006112012%20BDT%20mendukung%20transformasi%20PKH,%20rakor%20PKH.pdf>, Diakses 18 Januari 2016

Widjajanti, Kesi. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 15-27. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Yin, Robert K. (2002). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Penerjemah Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.